

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Ashafa, Burhan., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Safiruddin., 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dkk, Soegiri., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad., 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi., 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hatta, Mohammad., 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Henianti, Dini Dewi., 2017, *Sistem Peradilan di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid., 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Mannheim, Herman., 2016, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, Oxford University Press, New York.
- Marlina., 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.

- MD, Moh. Mahfud., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik., 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mulyana, Asep N., 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2014, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokasi di Pengadilan*, Papasa Sinar Sinanti, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah., 2013, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung.
- Salam, Moch. Faisal., 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan., 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sjarif, Amiroedin., 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehino., 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa., 2016, *Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar.
- Supriadi., 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer

### C. Skripsi dan Tesis

Alfan, Mokhammad, 2015, “Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer (Suatu Penelitian di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Larasati, Cindy Fajar, 2018, “Penerapan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, , Yogyakarta.

Siswa, Dimas Purna Adi, 2020, “Pertanggungjawaban Hukum Disiplin Militer Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Keluarga”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriyadi, 2015, “*Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum Oleh Militer di Indonesia*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tarta, Ahmad Firman, 2015, “Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ullistiya, Dina, 2020, “Bank Tanah: Konsep dan Prospek Penerapannya di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

### D. Website

DILMILTI-II Jakarta, 2021, “Daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta”, <http://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/9-layanan-publik/74-daerah-hukum-pengadilan-militer-tinggi-ii-jakarta.html>, Diakses tanggal 26 Januari 2021.

DISPENAD, Sejarah TNI 17 Juli 2012, <http://www.tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/sejarah/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Puspen, 2007, “Penyelenggaraan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK)”, <https://tni.mil.id/view-5042-penyelenggaraan-pertahanan-negara-sesuai-dengan-doktrin-tni-tri-dharma-eka-karma-tridek.html>, Diakses tanggal 17 Oktober 2020.

Kemdikbud, 2016, “Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”,  
*<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>*, Diakses tanggal 26 September  
2020.

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2010 perihal Banding perkara Serka Parsit., 13 Januari 2010.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 64-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2011 perihal Banding perkara Kopda Rachmat., 25 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 55-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2015 perihal Banding perkara Praka Haryanto., 18 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 perihal Banding perkara Serda Sulistiono., 20 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 perihal putusan tingkat pertama perkara Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi., 30 November 2016.